**DANA BOS DAN KUALITAS PENDIDIKAN**

**Sri Indah Pertiwi**

*Universitas Tanjungpura, Pontianak*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dana BOS yang diukur berdasarkan beberapa indikator pendidikan, diantaranya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipas Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Jumlah Putus Sekolah. Jenis dan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dengan metode analisis data yaitu analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dampak dari dana BOS terhadap kualitas pendidikan masih belum efektif. Tahun 2010-2021, RLS dan HLS di Indonesia terus mengalami peningkatan namun belum secara signifikan selama 12 tahun terakhir. APM dan APK tahun 2017-2021 juga menunjukkan ketidakmerataan antar setiap jenjang pendidikan dimana rendahnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan di tingkat SMP dan SM. Hal tersebut berdampak terhadap tingginya jumlah putus sekolah khususnya di jenjang SD. Dengan demikian, dana BOS dapat lebih difokuskan untuk menekan angka putus sekolah dengan melakukan pengawasan pada pelaksanaan program BOS agar kebermanfaatan dana BOS dapat lebih efektif.

**Kata Kunci**: *dana BOS, kualitas pendidikan, indikator pendidikan, efektivitas*

**ABSTRACT**

This study aims to determine the effectiveness of BOS funds as measured by several educational indicators, including average years of schooling (RLS), school life expectancy (HLS), net enrollment rate (APM), gross enrollment ratio (APK), and number of school dropouts. Type and source of data used is secondary data. Data collection technique through literature studies with data analysis methods, namely descriptive qualitative analysis. The research results show that the impact of BOS funds on the quality of education is still not effective. In 2010-2021, RLS and HLS in Indonesia have continued to increase but not significantly for the last 12 years. The APM and APK for 2017-2021 also show inequality between each level of education where community participation is low in studying at the junior and senior high school levels. This has an impact on the high number of dropouts, especially at the elementary level. Thus, BOS funds can be more focused on reducing the dropout rate by supervising the implementation of the BOS program so that the use of BOS funds can be more effective.

**Keywords**: *BOS fund, quality of education, education indicators, effectiveness*

1. **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu indikator terpenting dalam memajukan suatu bangsa. Pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing di tengah era yang semakin maju dan modern. Negara maju tercermin dari tingkat masyarakatnya dengan kualitas pendidikan yang tinggi. Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tidak terlepas dari peran pemerintah terutama dalam hal pembiayan pendidikan yang memadai agar pendidikan disetiap daerah di Indonesia dapat terselenggara dengan baik.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal tersebut mendukung tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan SDM yang berkualitas sebagai penentu kemajuan suatu negara. Pemerintah turut berupaya mewujudkan pendidikan yang bermutu dengan menggulirkan program-program penunjang salah satunya melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, dana BOS merupakan alokasi dana yang diperuntukan untuk mendanai belanja nonpersonalia di satuan pendidikan, baik dasar maupun menengah. Dana BOS ialah wujud implementasi sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

**Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Dana BOS Tahun Anggaran 2018-2023**

Sumber: Nota Keuangan dan LKPP 2018-2023 (data diolah)

Dana BOS yang cenderung meningkat setiap tahunnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna mendukung peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Secara umum dana BOS bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Secara khusus dana BOS digunakan untuk pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; penyediaan alat multimedia pembelajaran; serta penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Karenanya keberadaan dana BOS diharapkan dapat memperbaiki indikator-indikator pendidikan diantaranya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipas Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Jumlah Putus Sekolah. Namun, jika melihat dari indikator pendidikan tersebut, dampak dari dana BOS terhadap kualitas pendidikan masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya jumlah putus sekolah di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh faktor jumlah anggota keluarga. Rahmawati (2020) dalam penelitiannya mendapati bahwa jumlah anggota keluarga mempengaruhi keputusan anak untuk putus sekolah. Dengan banyaknya anak dalam suatu keluarga akan meningkatkan beban tanggungan orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga, orang tua atau anak itu sendiri akan mengambil keputusan untuk putus sekolah demi meringankan beban orang tuanya.

1. **METODE**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang didukung dengan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur terhadap sumber data yang telah dikumpulkan. Sedangkan untuk mendeskripsikan data masing-masing indikator menggunakan metode analisis data berupa analisis kualitatif deskriptif. Dengan metode analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis data setiap indikator berupa Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipas Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Jumlah Putus Sekolah atas pengaruhnya terhadap efektivitas dana BOS.

1. **HASIL**

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan kualitas pendidikan masyarakat melalui rata-rata jumlah tahun yang telah ditempuh dalam menjalani pendidikan formal dengan cakupan masyarakat usia 25 tahun ke atas. Kualitas SDM Indonesia dapat terlihat dari RLS dimana semakin tinggi RLS maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan jumlah tahun yang akan ditempuh untuk menjalani pendidikan formal di masa mendatang dengan cakupan masyarakat usia 7 tahun. Normalnya, jumlah tahun yang harus dijalani untuk menamatkan jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga tamat Sekolah Menengah (SM) adalah 12 tahun, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

**Gambar 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun Anggaran 2010-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pada tahun 2010-2021, RLS dan HLS di Indonesia terus mengalami peningkatan. RLS tahun 2021 sebesar 8,54 tahun meningkat dari tahun 2010 sebesar 7,46 tahun. RLS sebesar 8,54 tahun berarti secara rata-rata penduduk di Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8 tahun atau hanya menamatkan kelas VIII. Begitupun dengan HLS sebesar 7,46 tahun berarti secara rata-rata penduduk di Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7 tahun atau hanya menamatkan kelas VII. Sama halnya dengan HLS yang juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 sebesar 13,08 tahun meningkat dari tahun 2010 sebesar 11,29 tahun. HLS sebesar 13,08 tahun berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,08 tahun atau setara dengan Diploma I. Begitupun dengan HLS sebesar 11,29 tahun berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2010 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,29 tahun atau setara kelas XI.

RLS dan HLS yang terus mengalami peningkatan nyatanya kedua indikator ini masih berada di bawah target pemerintah dalam RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa di tahun 2021 target RLS sebesar 8,85 tahun dan target HLS sebesar 13,6 tahun. Namun, jika dilihat dari target RLS dan pencapaian pada tahun yang sama, angka tersebut masih sangat jauh dari target program Wajib Belajar 12 Tahun. Bahkan dalam 12 tahun terakhir RLS dan HLS masih belum mengalami peningkatan secara signifikan. Dan pencapaian RLS tidak sebanding dengan HLS mengingat peningkatan keduanya yang terbilang lambat dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa dana BOS belum berperan secara efektif dalam peningkatan RLS dan HLS. Dimana dana BOS diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan melalui ketercapaian yang diukur dengan meningkatnya kedua indikator tersebut sesuai target pencapaiannya.

**Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk melihat banyaknya masyarakat yang menempuh pendidikan dengan umur sesuai dengan ketentuan kelompok usia di setiap jenjangnya. Kelompok usia pada jenjang SD ditargetkan berusia 7-12 tahun, SMP berusia 13-15 tahun, dan SM berusia 16-18 tahun. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat pada suatu jenjang pendidikan dan daya tampung siswa dalam sistem pendidikan tanpa memperhatikan kesesuaian terhadap kelompok usia pada jenjang pendidikannya. Semakin tinggi APM maka akan terlihat anak yang tertib menempuh pendidikan sesuai kelompok usianya. Sedangkan semakin tinggi APK maka dapat terlihat banyaknya anak yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu.

**Gambar 3. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun Anggaran 2017-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Nilai APM dan APK tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Bahkan, peningkatan tersebut terjadi pada setiap jenjang, baik SD, SMP, maupun SM. Walaupun terjadi peningkatan, dana BOS masih belum menunjukkan pencapaian program Wajib Belajar 12 Tahun karena terlihat masih banyak masyarakat yang tidak bersekolah, khususnya pada tingkat SMP dan SM. World Bank (2015) menemukan bahwa meningkatnya angka transisi ke jenjang pendidikan selanjutnya tidak menunjukkan peningkatan yang sama dengan angka partisipasi sejak program BOS diperkenalkan. Peningkatan nilai APM mencerminkan masyarakat yang semakin memperhatikan ketepatan waktu sekolah sesuai jenjang pendidikan. Namun, tak sedikit pula masyarakat yang bersekolah di setiap jenjang namun usianya belum cukup atau bahkan lebih dari usia sekolah yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari selisih antara nilai APK dengan nilai APM pada tahun yang sama, dimana nilai APK cenderung jauh lebih besar dibandingkan APM.

Nilai APM dan APK tertinggi berada pada tingkat SD. APM di tingkat SD hampir menginjak angka 100 persen, bahkan APK telah melampaui 100 persen. Namun, terjadi kesenjangan di tingkat SMP dan SM dengan nilai APM dan APK yang lebih rendah dibandingkan di tingkat SD. Kartasasmita dan Sulistyaningrum (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa minat keputusan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SM dipengaruhi oleh manfaat dari dana BOS yang mereka terima pada tingkat sebelumnya. Dimana siswa yang menerima manfaat dana BOS sejak SD dan SMP, memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SM. Penelitian ini mengindikasikan bahwa dana BOS memengaruhi minat siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Rendahnya APM dan APK tingkat SMP dan SM salah satunya juga disebabkan oleh jangkauan wilayah yang harus di tempuh siswa untuk bersekolah di tingkat SMP dan SM yang menyebabkan biaya transportasi menjadi meningkat (Maududy & Aulia, 2018).

**Jumlah Putus Sekolah**

Jumlah Putus Sekolah menunjukkan banyaknya masyarakat dalam kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tingginya jumlah putus sekolah mengindikasikan akses pendidikan yang buruk. Hal ini seringkali terjadi di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Jumlah putus sekolah di Indonesia selama tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Penurunan yang cukup signifikan terjadi di jenjang SMK. Pada tahun 2017 mencapai 73.388 siswa yang mengalami putus sekolah menjadi 12.063 siswa di tahun 2021. Selain itu, pada jenjang SM juga mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2017 sebanyak 31.123 siswa putus sekolah menjadi 10.022 pada tahun 2021. Namun, masih terjadi lonjakan jumlah putus sekolah yang cukup besar pada tahun 2019 di jenjang SD sebanyak 59.443 siswa yang kemudian menurun di tahun 2021 sebanyak 38.176 siswa namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebanyak 32.127 siswa putus sekolah. Kharisma (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingginya jumlah putus sekolah pada anak berusia 7-15 tahun disebabkan oleh jumlah anggota keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga berakibat tingginya jumlah putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Padahal salah satu tujuan program BOS ini ialah untuk meringankan biaya pendidikan di rumah tangga. Namun, dana BOS nyatanya belum dapat menutupi seluruh biaya operasional sekolah sehingga masih membebankannya kepada orang tua siswa. World Bank (2015) juga menemukan hal yang sama, bahwa BOS belum berperan efektif dalam mengurangi biaya pendidikan di rumah tangga. Hal ini mengindikasikan dana BOS belum berperan efektif dalam menuntaskan kasus putus sekolah di Indonesia, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang terkendala ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

**Gambar 4. Jumlah Putus Sekolah Tahun 2019-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

1. **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap indikator-indikator pendidikan berupa Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipas Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Jumlah Putus Sekolah, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana BOS belum berperan secara efektif dalam meningkatkan RLS dan HLS. Hal ini dapat dilihat dari data RLS dan HLS dalam 12 tahun terakhir masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Mengingat anggaran program BOS ini cukup besar dalam APBN dan cenderung meningkat terlebih dalam 5 tahun terakhir.
2. Dana BOS belum berperan secara efektif dalam peningkatan APM dan APK. APM dan APK cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan disetiap jenjangnya juga mengalami peningkatan. Namun, terjadi kesenjangan antar tiap jenjang terlebih pada jenjang SMP dan SM terhadap SD. Sehingga mengindikasikan bahwa terjadi putus sekolah pada jenjang SD yang menyebabkan rendahnya APM dan APK pada jenjang SMP dan SM.
3. Dana BOS belum berperan secara efektif dalam menurunkan Jumlah Putus Sekolah. Masih tinggi jumlah putus sekolah yang terjadi di Indonesia terlebih pada jenjang SD. Hal tersebut disebabkan salah satunya oleh faktor ekonomi. Tujuan program BOS dalam meringankan biaya pendidikan di rumah tangga nyatanya masih belum dapat menuntaskan kasus putus sekolah bagi anak-anak yang terkendala ekonomi.

Ketercapaian setiap target indikator salah satunya didorong oleh anggaran BOS sehingga pemerintah perlu memperhatikan komposisi alokasi anggaran agar target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dapat tercapai. Disamping itu, APM dan APK yang terus meningkat harus dijadikan perhatian penting bagi pemerintah untuk mengimbanginya dengan meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan tujuan penyaluran dana BOS melalui peningkatan kualitas pengajar dan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Selain itu, rendahnya APM dan APK di tingkat SMP dan SM berakibat pada tingginya jumlah putus sekolah pada tingkat yang sama dibandingkan dengan tingkat SD. Pemerintah dapat membuat kebijakan terintegrasi antara akses ke setiap jenjang pendidikan seperti pendirian sekolah satu atap di daerah terdampak sehingga memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya. Dana BOS dapat lebih difokuskan untuk menekan angka putus sekolah dengan melakukan pengawasan pada pelaksanaan program BOS agar kebermanfaatan dana BOS dapat lebih efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik. *Indikator Pendidikan Tahun 2010-2021*.

Kartasasmita, F.P. & Sulistyaningrum, E. (2021). The Impact of School Operational Assistance Program Implementation at School Level on Senior Secondary Education Enrollment by Households: Evidence from Indonesia in 2007 and 2014. *Economics and Finance in Indonesia, 67*(2), 163–182.

Kharisma, B. (2018). Can a School Operational Assistance Fund Program (BOS) Reduce School Drop-Outs During The Post-Rising Fuel Prices in Indonesia? Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 19*(1), 12-23.

Maududy, I. & Aulia, A. (2018). Efisiensi Dana BOS Antar Provinsi di Indonesia: Apa yang Memengaruhi?. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik, 3*(3), 220-235.

Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018-2023.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Rahmawati, P. (2020). Pengaruh Program BOS Terhadap Keputusan Anak Putus Sekolah. *EFFICIENT: Indonesian Journal of Development Economics, 3*(1), 680-697.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

World Bank. (2015). *Improving Education through the Indonesian School Operational Assistance Program (BOS)*.